

Politisi Oposisi Rusia Ditahan di Moskow

LONDON (IM) - Politisi oposisi terkemuka Rusia Ilya Yashin ditahan di Moskow pada Senin (27/6). Seorang pengacara untuk tokoh oposisi dan seorang jurnalis Rusia mengatakan di akun media sosial mereka.

Irina Babloyan, seorang jurnalis dan pembawa acara di stasiun radio Ekho Mosky yang sekarang sudah tidak beroperasi, mengatakan bahwa Yashin ditahan saat keduanya berjalan bersama.

"Saya sedang berjalan dengan teman saya, Ilya Yashin, di taman. Polisi datang dan membawa Ilya pergi," kata Babloyan di aplikasi pesan Telegram.

Pengacara Vadim Prokhorov, yang telah mewakili banyak tokoh oposisi Rusia, juga mengatakan Yashin berada dalam tahanan polisi karena dugaan pelanggaran administratif terkait tindakan tidak mematuhi seorang perwira polisi.

"Saya tidak diizinkan mengunjungi Departemen Kepolisian Luzhnik (Moskow) untuk (melihat) Ilya Yashin yang ditahan," katanya di halaman Facebooknya. Reuters tidak dapat mem-

verifikasi laporan-laporan itu secara independen. Tidak ada konfirmasi resmi penahanan itu dari pihak berwenang Rusia.

Penahanan Yashin adalah yang terbaru dalam tindakan keras yang lebih luas dan berlangsung lama terhadap penentang Kremlin. Politisi oposisi Alexei Navalny adalah kritikus Kremlin paling terkenal yang dipenjara, menjalani hukuman 11 tahun 6 bulan.

Sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada Februari, ribuan orang telah ditahan dalam protes di puluhan kota di seluruh Rusia. Yashin, seorang wakil kota untuk distrik Krasnoselsky Moskow, adalah seorang kritikus yang blak-blakan terhadap perang yang oleh Kremlin disebut sebagai "operasi militer khusus".

"Saya tinggal di Rusia. Saya telah mengatakan sebelumnya dan saya terus mengulangi, Rusia dan Ukraina tidak boleh saling membunuh. Jika saya ditakdirkan untuk berakhir di penjara karena pidato antiperang, saya akan menerimanya dengan bermartabat," cuit Yashin pada 7 Maret. ● gul



SUASANA RAPAT KEPALA NEGARA G7

IDN/ANTARA

Situasi pada rapat antara kepala negara G7 dan tamu undangan di G7 working session di resor Bavarian dekat Garmisch-Partenkirchen, Jerman, Senin (27/6).

Krisis Sri Lanka, Pemerintah Tutup Sekolah untuk Hemat Bahan Bakar

Antrean di SPBU Sri Lanka pun meningkat pesat sejak pekan lalu.

COLOMBO (IM) - Sri Lanka sedang memerangi krisis ekonomi terburuknya dalam tujuh dekade terakhir. Pulau berpenduduk 22 juta jiwa itu berjuang untuk membayar kebutuhan impor penting, seperti makanan, obat-obatan dan yang paling kritis, yakni bahan bakar dengan cadangan devisa pada rekor terendah.

Pemerintah telah meminta pekerja bekerja dari rumah

atau work from home (WFH) sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sementara itu, sekolah-sekolah juga telah ditutup selama seminggu di Ibu Kota Sri Lanka, Colombo dan sekitarnya.

Dilansir dari Malay Mail, pasukan Sri Lanka pada Selasa (28/6) menyerahkan token kepada orang-orang yang mengantre untuk mendapatkan bensin di tengah kekurangan bahan bakar parah. Salah satunya adalah

seorang pengemudi becak bernama WD Shelton (67).

Shelton merupakan salah satu yang menerima token tersebut untuk mempertahankan tempatnya dalam antrian saat bahan bakar tersedia. "Saya sudah mengantre selama empat hari, saya belum tidur atau makan dengan benar selama ini," kata Shelton.

Shelton mendapatkan nomor urut antrian 24 di sebuah pom bensin di pusat Kota Colombo. Namun, ia tetap harus berada di sana karena tidak memiliki bahan bakar untuk perjalanan ke rumahnya yang hanya berjarak lima kilometer. "Kami

tidak bisa mencari nafkah, kami tidak bisa memberi makan keluarga kami," ungkap dia.

Antrean di SPBU pun meningkat pesat sejak pekan lalu. Menteri Tenaga dan Energi Sri Lanka, Kanchana Wijesekera pada Minggu (26/6) mengatakan stok cadangan bahan bakar diperkirakan mencapai 9.000 ton solar dan 6.000 ton bensin, tetapi tidak ada pengiriman baru yang dijadwalkan. Pun belum diketahui secara jelas, seberapa jauh pemerintah dapat meregangkan cadangan bahan bakarnya.

"Ini adalah tragedi, kami tidak tahu kapan ini akan be-

akhir," tambah Shelton.

Di samping itu, angkutan umum, pembangkit listrik dan layanan medis akan mendapatkan prioritas dalam distribusi bahan bakar, dengan beberapa dijajah ke pelabuhan dan bandara.

Sebuah tim dari Dana Moneter Internasional mengunjungi Sri Lanka untuk mengadakan pembicaraan tentang paket bail out sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat.

Sri Lanka berharap untuk mencapai kesepakatan tingkat staf sebelum kunjungan berakhir pada Kamis (30/6), hal itu tidak mungkin untuk membuka dana segera. ● tom

PBB Desak Libya Adakan Pemilu

NEW YORK (IM) - Kepala politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Rosemary DiCarlo mendesak faksi-faksi di Libya untuk menyetujui langkah-langkah yang mengatur transisi untuk melaksanakan pemilihan umum.

Dia berharap ini akan mengarah pada pemungutan suara yang telah lama ditunggu-tunggu untuk terlaksana secepat mungkin.

DiCarlo mengatakan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, bahwa selama pembicaraan di Kairo dari 12-20 Juni para pesaing mencapai konsensus luas tentang sebagian besar pasal yang diperdebatkan dalam konstitusi yang diusulkan pada 2017.

"Kami didorong bahwa para pemimpin kedua sisi telah menerima undangan penasihat khusus (PBB) Stephanie Williams untuk bertemu di Jenewa dari 28-29 Juni untuk membahas dan mencapai kesepakatan tentang langkah-langkah yang mengatur periode transisi menuju pemilihan," katanya.

Pertemuan Kairo adalah yang pertama yang melibatkan parlemen Libya yang berbasis di timur Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Tinggi Negara yang berbasis di barat di Tripoli. Kedua kelompok yang bersaing ini terlibat dalam peninjauan serius dari proposal konstitusional sejak diadopsi pada 2017.

Negara yang kaya minyak telah dirusak oleh konflik sejak pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan dan membunuh diktator lama Moammar Gadhafi pada 2011. Negara itu kemudian dipecah oleh pemerintahan saingan di timur yang didukung oleh komandan militer Khalifa Hifter melawan kelompok yang berada di ibu kota Tripoli.

Masing-masing pihak didukung oleh militer dan kekuatan asing yang berbeda. DiCarlo mendesak 15 neg-

ara anggota DK dan semua mitra internasional Libya untuk menyerukan kepemimpinan dua kelompok mengambil kesempatan yang disajikan oleh kesepakatan yang dicapai di Kairo. Desakan ini diharapkan akan membuat pemilihan umum terjadi.

Libya berencana untuk melakukan pemilihan pada 24 Desember lalu dan gagal setelah pemerintahan sementara yang berbasis di Tripoli yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah gagal melanjutkan pemungutan suara. Kegagalan itu merupakan pukulan besar bagi upaya internasional untuk mengakhiri satu dekade kekacauan di Libya.

Dbeibah menolak untuk mundur, menimbulkan pertanyaan atas kemampuannya. Sebagai tanggapan, anggota parlemen yang berbasis di timur negara itu memilih perdana menteri saingan Fathy Bashagha. Dia sekarang menjalankan pemerintahan terpisah di luar kota Sirte.

DiCarlo menyerukan upaya rekonsiliasi nasional. Dia memperingatkan bahwa perpecahan politik yang berkelanjutan berkontribusi pada lingkungan keamanan yang tegang di dan sekitar Tripoli.

Setelah pertemuan Kairo baru-baru ini, laporan media Libya mengklaim bahwa topik utama yang diperebutkan adalah kriteria pencalonan presiden. Menurut laporan itu, dewan yang berbasis di Tripoli bersikeras melarang personel militer mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi negara itu.

Pemintaan itu tampaknya diarahkan pada Hifter, seorang pemimpin militer yang mengumumkan tawarannya untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Desember. Sementara anggota parlemen yang berbasis di timur menyerukan untuk mengizinkan personel militer agar dapat mengikuti pemilihan. ● gul

Jepang Alami Suhu Terpanas dalam 150 Tahun

TOKYO (IM) - Jepang terpanas di bawah suhu terik untuk hari keempat berturut-turut pada Selasa (28/6), saat panas ibu kota memecahkan rekor hampir 150 tahun untuk bulan Juni. Pihak berwenang memperingatkan pasokan listrik tetap cukup ketat untuk meningkatkan momok pemataman.

Suhu tertinggi 36 C diperkirakan terjadi di Tokyo pada Selasa, setelah tiga hari berturut-turut suhu mencapai 35 C. Ini merupakan rentetan cuaca panas terburuk pada bulan Juni sejak pencatatan dimulai pada 1875.

Kasus rawat inap akibat sengatan panas meningkat di pagi hari, dengan banyak orang di ibu kota terus melanggar saran pemerintah dengan terus memakai masker wajah di luar ruangan, warisan lebih dari dua tahun pandemi Covid-19.

Untuk hari kedua, pihak berwenang meminta konsumen di wilayah Tokyo untuk menghemat listrik guna menghindari pemadaman listrik yang mengancam. Gelombang panas datang kurang dari dua minggu sebelum pemilihan nasional di mana lonjakan harga, termasuk listrik, dinilai menjadi perhatian utama bagi pemilih dalam jajak pendapat yang menunjukkan peringkat persetujuan pemerintah yang merosot.

Pada pukul 9:00 waktu setempat, 13 orang telah dibawa ke rumah sakit dengan dugaan sengatan panas, kata Fuji News Network. Setidaknya dua orang diyakini telah meninggal karena sengatan panas, kata media, mendorong pihak berwenang untuk memoderasi seruan mereka untuk penghematan listrik.

"Tampaknya ada beberapa orang tua yang mematikan AC

mereka karena kami meminta orang untuk menghemat energi, tapi tolong, ini panas, jangan ragu untuk mendinginkannya," kata Menteri Perdagangan dan Industri Koichi Haguda dalam konferensi pers sebagaimana dilansir Reuters.

Pemerintah memperingatkan pada Senin (27/6) bahwa kapasitas pembangkit cadangan bisa turun di bawah 5% pada Selasa sore, mendekati minimum 3% yang menjamin pasokan yang stabil, di Tokyo dan delapan prefektur sekitarnya. Cadangan kapasitas di bawah 3% berisiko kekurangan listrik dan pemadaman.

Kantor-kantor pemerintah pada Senin, termasuk Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI), mematikan beberapa lampu di sore dan malam hari, dengan METI menghentikan penggunaan 25% lift di gedungnya. ● ans

Pemerintah Prancis Kembali Minta Warga Gunakan Masker di Area Publik

PARIS (IM) - Menteri Kesehatan Prancis Brigitte Bourguignon mengatakan, warga Prancis harus mulai mengenakan masker lagi di tempat-tempat ramai, terutama di transportasi umum. Negara itu saat ini sedang menghadapi gelombang baru infeksi Covid-19.

"Saya tidak mengatakan itu harus wajib tetapi saya meminta orang-orang Prancis untuk mengenakan masker di transportasi umum," kata Bourguignon.

Bourguignon menyatakan, penggunaan masker di area publik adalah tugas sipil untuk melakukannya. "Saya tidak hanya menasihati, saya meminta," menambahkan masker juga harus dipakai kembali di area tertutup lainnya, seperti tempat kerja atau toko.

Prancis melaporkan 17.601 infeksi virus corona baru selama 24 jam terakhir, angka tertinggi untuk hari Senin sejak 18 April. Lima hari lalu, kepala vaksinasi Prancis Alain Fischer mengonfirmasi bahwa negara itu berada di tengah gelombang baru Covid-19, seperti negara-negara Eropa lainnya.

Fischer secara pribadi mendukung penerapan kembali wajib masker di transportasi umum. Keputusan ini mempertimbangkan laju infeksi baru yang terus meningkat sejak akhir Mei di Prancis.

Rata-rata pergerakan tujuh hari dari kasus baru harian lebih dari empat kali lipat dari pada 27 Mei dengan jumlah 17.705 hingga 71.018 pada Senin. Jumlah itu masih lima kali lebih rendah dari rekor 366.179 di awal tahun.

Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena penyakit itu turun ke level terendah enam bulan di 13.876 pada 18 Juni tetapi sejak itu meningkat 1.223 menjadi 15.099, tertinggi empat minggu. Korban meninggal akibat Covid-19 di Prancis naik 48 selama 24 jam pada Selasa, dengan menjadi 149.406. Biasanya ada penurunan dua minggu antara kasus dan tren rawat inap dan kemudian penurunan serupa terkait kematian akibat Covid-19. ● ans



IDN/ANTARA

UNJUK RASA ANTI PEMERINTAH DI EKUADOR
Seorang wanita pribumi mengikuti aksi protes anti-pemerintah di Quito, Ekuador, pada Senin (27/6), di tengah kebuntuan antara pemerintahan Presiden Guillermo Lasso dan demonstran pribumi yang menuntut diakhirinya penetapan masa darurat.

Perang Rusia-Ukraina Disebut Bisa Picu Produksi Narkoba Ilegal Terus Merajalela

NEW YORK (IM) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa perang di Ukraina dapat menyebabkan produksi narkoba ilegal terus merajalela, sementara masa depan pasar opium bergantung pada nasib Afghanistan yang sedang dilanda krisis.

Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan (UNODC) dalam laporan tahunan mengatakan pengalaman sebelumnya dari Timur Tengah dan Asia Tenggara mengisyaratkan zona konflik bisa bertindak sebagai "magnet" untuk membuat narkoba sintetis, yang bisa diproduksi di mana saja.

"Efeknya mungkin lebih besar ketika area konflik dekat dengan pasar konsumen yang besar," tulis laporan itu, dikutip VOX, Selasa (28/6). UNODC mengatakan jumlah laboratorium amfetamin yang dibongkar di

Ukraina naik dari 17 pada 2019 menjadi 79 pada 2020, jumlah terbanyak yang dilaporkan di negara manapun pada 2020.

Laporan itu mengatakan kapasitas Ukraina untuk memproduksi obat-obatan sintetis bisa naik selama perang berlangsung.

"Tidak ada polisi yang berkeliaran dan menyapot laboratorium di zona konflik," terang pakar UNODC Angela Me kepada AFP.

Laporan PBB mengatakan situasi di Afghanistan, yang memproduksi 86 persen opium dunia pada 2021, akan membentuk perkembangan pasar opium.

Laporan tersebut menambahkan bahwa krisis kemanusiaan di negara itu dapat mendorong penanaman opium ilegal, bahkan setelah pihak berwenang Taliban melarang budidaya opium pada awal April lalu. ● gul



MOSAIK ERA ROMAWI

IDN/ANTARA

Petugas membersihkan mosaik era Romawi yang dipugar setelah dipajang di situs aslinya di Lod, yang sekarang menjadi kota di Israel yang dijadikan sebagai pusat arkeologi. Gambar diambil dengan pesawat nirawak (drone) pada Senin (27/6).